BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Politik identitas akhir-akhir ini sangat populer di kalangan masyarakat, karena politik identitas muncul dari kepentingan kelompok minoritas yang terpinggirkan. Banyak masyarakat yang belum memahami fenomena politik identitas, maka dari itu dengan adanya fenomena politik identitas ini perlu landasan teori yang mampu menjelaskan secara ilmiah, untuk mengontrol apa yang terjadi sekarang ini, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya hal tersebut. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam politik identitas perlu pembahasan antara agama dan politik.

Secara definisi, politik identitas berasal dari dua kata, yaitu "politik" dan "identitas". Arti kata politik secara etimologis berasal dari kata Yunani yaitu *politeia* atau *polis* yang berarti kota atau negara. Pengertian politik secara definisi ada dua pandangan. *Pertama*, yang mengaitkan politik dengan negara, pemerintahan pusat, ataupun daerah. *kedua*, yang mengkaitkannya menggunakan masalahah kekuasaan, otoritas, atau menggunakan permasalahan persoalan tertentu.

Sedangkan pengertian identitas yaitu ciri khas suatu kelompok, seperti agama, suku, ras, dan ciri kelompok lainnya.³

¹ Muhamad Nurul Firdaus dan Lusi Andriyani, "Politik Atas Identitas Agama, Dan Etnis Di Indonesia," *Independen: Jurnal Politik Indonesia dan Global* 2, no. 2 (2021): 47.

² Leli Salman Al- Farisi, "Politik Identitas: Ancaman Terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara Pancasila," *Jurnal Aspirasi*, no. 2 (2018): 77–90.

³ Muhammad Muis, "Politik Identitas Prespektif Al-Qur'an (Kajian Tematik Ayat-ayat Politik Identitas dalam Al-Qur'an)" (Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an, 2020), 12.

Salah satu contoh politik identitas terdapat pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang memasukkan narasi keagamaan ke dalam politik. Sebagai calon Gubernur DKI Jakarta, Ahok melontarkan klaim dalam narasinya terkait QS. Surat Al-Mā'idah ayat 51, yang isi nya tidak sesuai dengan apa yang ada dalam surat Al-Maidah tersebut. Banyak umat Islam yang meremehkannya karena tidak sesuai dengan isi surat Al-Mā'idah, maka dari itu umat Islam sangat mengedepankan agamanya untuk membela dari ketidaksesuaian isi dalam narasi tersebut. Maka, politik identitas yang mengedepankan agama mulai muncul dari permasalahan di atas.⁴

Sedangkan politik identitas dalam al-Qur'an yaitu ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang politik identitas. Politik identitas sebenarnya tidak dijelaskan langsung dalam al-Qur'an, namun ada beberapa istilah yang berkaitan dengan politik identitas. Seperti: politik identitas agama, politik identitas jenis kelamin, politik identitas etnis, suku, budaya, dan antar golongan. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang politik identitas agama yaitu dalam QS. Āli-'Imrān: 28:

Artinya: "Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai para wali dengan mengesampingkan orang-orang mukmin. Siapa yang melakukan itu, hal itu sama sekali bukan dari (ajaran) Allāh, kecuali untuk menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari

⁴ Firdaus dan Andriyani, "Politik Atas Identitas Agama, Dan Etnis Di Indonesia," 47.

mereka. Allāh memperingatkan kamu tentang diri-Nya (siksa-Nya). Hanya kepada Allāh tempat kembali." (QS. Āli-ʿImrān: 28).

Sayyid Qutb dalam tafsīrnya *Fī Zilāl al-Qur'an*, menjelaskan bahwa Allāh SWT melarang orang beriman mengangkat orang kafir sebagai pemimpin, karena bukan dari ajaran Allāh SWT. Dalam al-Qur'an pun dijelaskan larangan bagi kaum Yahudi (kafir) untuk mejadi pemimpin. Kecuali untuk melindungi diri dari ketakutan mereka. Karena hanya kepada Allāh lah tempat kembali.⁵

Berdasarkan pada argumentasi diatas penulis akan membahas tentang politik identitas dalam al-Qur'an. Karena dalam al-Qur'an sudah dijelaskan mengenai berbagai istilah-istilah tentang politik identitas. Oleh karena itu, penelitian mengenai politik identitas dalam al-Qur'an sangat penting dalam upaya menjaga kerukunan dalam masyarakat kita, khususnya di Indonesia. Maka perlu diadakannya penelitian lebih lanjut mengenai politik identitas dalam al-Qur'an, agar masyarakat tidak bingung dengan permasalahan politik identitas selanjutnya.

Untuk menyelesaikan permasalah pada penelitian ini penulis menggunakan metode tafsīr *al-Maqāṣidī*. Tafsīr *al-Maqāṣidī* yaitu sebagai salah satu aliran tafsīr yang menjelaskan makna-makna logis dan mempunyai tujuan-tujuan yang ada dalam al-Qur'an, dengan menjelaskan bagaimana cara memanfaatkannya untuk kemasalahatan umat. Selain itu juga, maksud dan tujuan umum dari al-Qur'an adalah mampu memunculkan teks-teks yang ada dalam al-Qur'an dan

⁵ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid 2. (Darusy Syuruq, Beirut, 1992), 55–56.

dijelaskan oleh para ulama. Pembahasan yang ada dalam al-Qur'an ada berbagai macam misalnya: akidah dan akhlak, ibadah, sosial, pernikahan dan perceraian, hukum waris, dan hukum-hukum lainnya, politik, edukasi, masyarakat dan lain sebagainya. 6

Adapun yang sudah saatnya mendominasi pendekatan baru dalam menafsirkan al-Qur'an dengan nilai-nilai fundamentalnya muncul dengan pendekatan penafsiran baru disebut dengan tafsīr *al-Maqāṣidī*, yang dianggap mampu menyelesaikan antara teks, konteks, dan kontekstualitas. Maka dari itu dengan adanya tafsīr *al-Maqāṣidī* ini bisa menyelesaikan maksud dan tujuan dari suatu teks dalam al-Qur'an. Biasanya politik identitas memiliki permasalahan yang terkait dengan perbedaan-perbedaan pada fisik, tubuh, agama, budaya, atau bahasa sehari-hari yang digunakannya.

Inilah hal penting yang mendasari penulis, untuk meneliti politik identitas dalam al-Qur'an. Dengan adanya penelitian ini dapat tercapainya pemahaman-pemahaman yang valid di masyarakat terhadap politik identitas dalam al-Qur'an. Maka dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahas tentang PENGGUNAAN POLITIK IDENTITAS DALAM AL-QUR'AN (Studi Tafsīr Al-Maqāṣidī dalam Kitab Tafsīr Fī Zilāl Al-Qur'an Karya Sayyid Quṭb).

⁶ Abu Zayd Wasfi Asyur, "Metode Tafsir Maqasidi," in *Metode Tafsir Maqasidi* (Jakarta: Qaf Media, 2020).

⁷ Umayyah, "Tafsir Maqashidi: Metode Al-Ternatif Dalam Penafsiran Al-Qur'an," *Diya al-Afkar* 4, no. 01 (2016).

⁸ Widya Oktavia, "Tafsir Maqāṣidi Mahar Ibn 'Āsyūr" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

B. Rumusan Masalah

Dari pembahasan diatas terdapat beberapa permasalahan, untuk menyelesaikan permasalahannya penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana politik identitas dalam al-Qur'an?
- 2. Bagaimana penafsiran ayat-ayat politik identitas dalam tafsīr *Fī Zilāl al-Qur'an*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini diantaranya yaitu :

- 1. Untuk mengetahui bagaimana al-Qur'an membahas politik identitas.
- 2. Untuk mengetahui penafsiran Sayyid Quṭb dalam tafsīr *Fī Zilāl al-Qur'an* terhadap ayat-ayat politik idetitas.

D. Manfaat Penelitian

Pada manfaat penelitian ini, dapat dibedakan menjadi dua manfaat penelitian yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritas penulis berharap pada pembahasan ini dapat memberikan keilmuannya pada masyarakat umum khususnya tetang politik identitas. Selain itu juga, untuk memperkaya keilmuan dalam menafsirkan politik identitas dalam al-Qur'an upaya terjadinya perdebatan di masyarakat.

Pada kajian penggunaan politik identitas dalam al-Qur'an ini, akan menjawab pertanyaan apakah benar politik identitas ini ada pada ayat-ayat al-Qur'an atau tidak? Karena pada dasarnya dalam al-Qur'an sudah dijelaskan. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penggunaan tafsīr *al-Maqāṣidī* terhadap penafsiran Sayyid Quṭb dalam persoalan politik identitas.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap pada pembahasan ini dapat dijadikan sebagai refleksi bahan dan juga penilaian untuk mengurangi kesalahpahaman dikalangan masyarakat menyikapi dalam permasalahan tentang identitas politik. Selain meminimalisir kesalahpahaman, untuk meningkatkan keimanan kita memotivasi kita untuk terus berpikir kritis dan analisis dalam menyelesaikan sebuah masalah di masyarakat.

E. Kajian Pustaka

Setelah melakukan penelusuran, penulis belum menemukan judul yang sama. Akan tetapi melalui penelusuran penulis melalui karya tulis ilmiah, jurnal, dan lain sebagainya ada beberapa tema yang senada dengan pembahasan ini diantaranya yaitu:

Penelitian pertama, dilakukan oleh Muhammad Muis mahasiswa PTIQ Jakarta dengan judul skripsi Politik Identitas dalam al-Qur'an (Kajian tematik ayat-ayat politik identitas dalam Al-Qur'an). Penelitian ini membahas tentang Politik Identitas dalam al-Qur'an dan bagaimana al-Qur'an menyikapi wawasan politik identitas. Juga mengumpulkan ayat-ayat politik identitas dalam al-Qur'an ⁹ Perbedaannya dalam penelitian ini yaitu hanya membahas pemikiran

⁹ Muis, "Politik Identitas Prespektif Al-Qur'an (Kajian Tematik Ayat-ayat Politik Identitas dalam Al-Qur'an)."

politik identitas Sayyid Qutb, dan juga mengkaji ayat-ayat politik identitas menggunakan metode tafsīr *al-Maqāṣidī*.

Penelitian kedua, dilakukan oleh Fuad Luthfi Mahasiswa UIN Jakarta dengan judul skripsi Konsep Politik Islam Sayyid Qutb dalam Tafsīr *Fī Zilāl al-Qur'an*. Penelitian ini membahas tentang konsep merumuskan politik Islam menurut pemikiran Sayyid Qutb dalam tafsīr *Fī Zilāl al-Qur'an*. Diantaranya membahas tentang prinsip-prinsip pemerintahan, tujuan negara, konsep kewarganegaraan, prinsip pengaturan kebijaksanaan negara. Perbedaannya pada penelitian ini yaitu membahas pemikiran politik identitas, dan juga membahasa macam-macam politik identitas seperti identitas agamanya, identitas gendernya, identitas etnis, suku, budaya dan lain sebagainya.

Penelitian ketiga, dilakukan oleh Saifuddin Herlambang Mahasiswa UIN Jakarta dengan judul disertasinya Politik Identitas Dalam Tafsīr *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr Ṭāhir Ibnu Āsyūr* (Studi Tafsīr *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr Ṭāhir Ibnu Āsyūr* karya Ibnu Āsyūr). Penelitian ini membahas tentang pemikiran politik identitas Ibnu Āsyūr dalam kitab Tafsīr nya yaitu Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr Ṭāhir Ibnu Āsyūr. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini yaitu membahas pemikiran politik identitas Sayyid Quṭb dalam kitab tafsīr *Fī Ṭilāl al-Our'an*. ¹¹

 10 Fuad Luthfi, "Konsep Politik Islam Sayyid Quthb Dalam Tafsir Fi Zhilal Qur'an" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

¹¹ Saifuddin Herlambang, "Politik Identitas Dalam Tafsir Studi tafsir al-Tahir Wa al-Tanwir karya Ibn 'Ashur" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

F. Kerangka Teori

Politik identitas adalah strategi untuk memobilisasi massa dengan menggunakan identitas sebagai bentuk untuk menarik individu untuk berproses terhadap kepentingan anggota kelompoknya. Dari identitas tersebut dapat menarik setiap individu yang mempunyai kesamaan baik dari agama, suku, dan budaya. Apabila masyarakat sudah terorganisir maka akan merasa dirinya paling baik terhadap kelompok-kelompok lainnya. Maka dalam hal ini akan menjadi permasalahan terbesar. Menurut Jeffrey Haynes, jika identitas dikaitkan dengan kepemilikan di antara banyak orang sebagai sarana untuk membedakan diri dari orang lain, maka fenomena ini menyoroti pentingnya identitas baik bagi individu maupun kelompok. 12

Jadi maksud dari pengertian politik identitas ialah sebuah tindakan politis seseorang atau kelompok untuk mengedepankan kepentingan dari anggota kelompoknya atas dasar kesamaan identitas atau ciri baik sesuai ras, etnis, gender, kepercayaan untuk mendapatkan keadilan dan kesetaraan dengan tujuan menjaga keberadaan kultur mereka. Sri Astuti Bukhari menjelaskan bahwa politik identitas ialah alat politik kelompok etnis untuk mencapai tujuan tertentu ditujukan untuk mengatasi kelompok etnis, seperti ketidakadilan politik yang menimpa mereka. 14

¹² M. Taufiq Rachman, *Agama dan Politik Identitas dalam Kerangka Sosial*, ed. Rifki Rosyad dan Asep Iwan Setiawan (Bandung: Prodi S2 Studi Agama-agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

¹³ Muis, "Politik Identitas Prespektif Al-Qur'an (Kajian Tematik Ayat-ayat Politik Identitas dalam Al-Qur'an)," 12.

¹⁴ Sri Astuti Buchari, *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 20.

Eric Hiariej mengungkapkan bahwa politik identitas ini bukan sebuah ancaman, melainkan politik identitas berkaitan erat untuk memperjuangkan hak-hak serta pengakuan terhadap keberadaan kelompok-kelompok minoritas. politik identitas ini bentuk perlawanan ketidakadilan, namun pula sangat berkaitan dengan pluralisme serta demokrasi. Dengan demikian politik identitas ini suatu hal yang diperbolehkan. ¹⁵

Adapun politik identitas dalam al-Qur'an yaitu istilah kata al-Qur'an yang berkaitan dengan politik identitas terhadap dunia perpolitikan. istilah politik identitas sebenarnya tidak diterjemahkan secara jelas di dalam al-Qur'an, namun ada beberapa penelit yang menemukan istilah-kata yang mengungkapkan tentang politik identitas. Dalam hal ini adanya ketidaksesuain dan tidak sistematis saat ditampilkan pada zaman modern sekarang ini, maka dengan adanya kajian-kajian al-Qur'an memberikan isyarat-isyarat mengenai politik identitas dalam dunia perpolitikan. Hal ini juga menjadi keterkaitan terhadap kebijakan politik identitas dalam al-Qur'an. ¹⁶

Salah satu contoh politik identitas yang muncul pada tahun 2016 pada pemilihan PILKADA Jakarta. Hal ini menjadi permasalahan di berbagai aspek kehidupan negara, termasuk juga terhadap sistem demokrasi di Indonesia saat ini. Sedangkan negara indonesia masih tahap pembelajaran dalam sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi politik identitas ini dibolehkan, akan tetapi apabila politik identitas itu

¹⁵ Herlambang, "Politik Identitas Dalam Tafsir Studi tafsir al-Tahir Wa al-Tanwir karya Ibn 'Ashur," 90.

-

¹⁶ Muis, "Politik Identitas Prespektif Al-Qur'an (Kajian Tematik Ayat-ayat Politik Identitas dalam Al-Qur'an)," 45–46.

berlebihan maka akan berpengaruh tidak baik terlebih di Indonesia yang masyarakatnya dari berbagai macam kalangan baik ras, suku, agama, budaya. Maka dalam hal ini muncul lah politik identitas yang mengatasnamakan agama Islam.¹⁷

Salah satu munculnya contoh politik identitas yang mengatasnamakan agama Islam pada zaman sekarang dapat meningkatkan popularitas. Hal ini banyak dimanfaatkan oleh sekelompok Islam, yang bertujuan untuk mencapai negara Islam. Karena pada saat ini jumlah penganut agama Islam di Indonesia diperkirakan lebih dari 20 juta orang pertahun. Jumlah ini meningkat secara signifikan sejak pemilu tahun 2019 yang menimbulkan banyak pertanyaan mengenai identitas Islam.

Islam mengajarkan konsep-konsep kemanusiaan yang berkaitan dengan urusan duniawi, seperti bagaimana mengelola sistem perekonomian, menegakkan hukum, dan konsep-konsep terkait lainnya, termasuk konsep politik. Salah satu konsep politik yang sudah tercatat sejak zaman Rasulullāh Saw. Ketika Rasulullāh Saw melakukan ke kota Madinah, beliau mampu mengidentifikasi perjalanan masyarakat yang terdiri dari berbagai keyakinan agama dan perbedaan sosial yang berbeda-beda dalam satu kelompok. Dalam perjanjiannya dengan orang-orang Yahudi bahwa hanya ada satu "negara" yang menganut prinsip demokrasi. Dalam hal ini mencakup penerapan teori politik Nabi untuk menciptakan stabilitas politik dalam negara.

Sayyid Qutb ialah seorang tokoh politik Islam terkemuka yang sangat prihatin terhadap perkembangan Islam dan memiliki pengaruh

¹⁷ Haikal Fadhil Anam, "Politik Identitas Islam dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi di Indonesia," *Politea* 2, no. 2 (2019): 181.

besar di dunia Islam. Sebagai politisi Islam dalam perjuangannya menegakan sistem politik Islam Sayyid Quṭb menulis karya tafsīrnya yang sangat terkenal yaitu tafsīr *Fī Zilāl al-Qur'an*. Sayyid Quṭb menjelaskan bahwa masyarakat dihadapkan dengan dua pilihan konsep politik yaitu konsep jahiliyah dan Islam. *pertama* yaitu produk dari masyarakat massa sektarian dan *kedua* yaitu produk dari agama. Kebijakan ini diterapkan oleh bangsa adikuasa yang menguasai dunia, sehingga menjadi kontroversi dikalangan umat Islam. ¹⁸

Namun menurut Sayyid Qutb, sudah terjadi beberapa perkembangan di bidang politik pemerintahan. Dalam sejarah perkembangan sosial Islam yang dimulai sekitar tahun 1949, muncul tiga pilar utama pembangunan sosial, yaitu: saling pengertian, solidaritas kemanusiaan, dan ikatan sosial yang kuat. Menurut Sayyid Qutb tiga dasar pembangunan sosial dalam islam harus ditegakkan, karena hal ini terlebih dahulu harus mengedepankan keutamaan-keutamaan Islam sebagai agama, selain itu juga untuk memperkuat argumentasi yang sangat ideal dalam Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode Library Research, yang lebih membahas terkait dengan penelitian Tafsīr ayat-ayat politik identitas

18 Luthfi, "Konsep Politik Islam Sayyid Quthb Dalam Tafsir Fi Zhilal Our'an " 1–3

Qur'an," 1–3.

Juandi Juandi, "Pemikiran Politik Sayyid Quthb: Melacak Geneologi Kekerasan," *Jurnal Pemikiran Islam* (2011): 8–9.

dalam al-Qur'an menggunakan metode tafsīr *al-Maqāṣidī* dalam kitab Tafsīr Sayyid Quṭb.

2. Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitiannya, maka untuk mendapatkan sumber-sumber data yang falid penulis membagi menjadi dua yaitu sumber data sekunder dan sumber data primer.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari kumpulan data pertama di lokasi penelitian, yang disebut juga sebagai objek penelitian. Atau bisa juga disebut dengan data yang berasal dari sumber-sumber yang asli yang memuat seluruh informasi atau data penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder diartikan sebagai data yang berasal dari sumber kedua atau sumber kedua dari data yang diperlukan. kumpulan data yang kedua adalah data itu berasal dari sumber yang tidak sepenuhnya asli dari informasi atau data penelitian.²⁰

3. Analisi Data

Untuk proses analisi data, penulis memahami pengertian yang terdapat dalam pembahasan tersebut. Pertama, mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan politik identitas, menganalisis dan meneliti, mencari ragam, karakter,

 $^{^{20}}$ Rahmadi, $Pengantar\ Metodologi\ Penelitian, Antasari\ Press, 2011, 129.$

syarat, kaidah, aturan manfaat, ataupun pengaruh baru yang berhubungan dengan pembahasan yang akan dikaji.²¹

Sehingga dari proses analisis data diatas penulis menggunakan metode tafsīr *al-Maqāṣidī* yaitu menafsirkan al-Qur'an dengan tujuan-tujuan yang muncul pada teks al-Qur'an dan diungkapkan oleh banyak mufassir dan mayoritas ulama. Salah satunya yaitu pada tafsīr *Fī Zilāl al-Qur'an* karya Sayyid Quṭb.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penulis akan membagi sistematika penulisan terbagi menjadi lima yang saling berkaitan antara bab satu dengan bab yang lainnya.

Bab Pertama, dalam bab ini penulis akan membahas secara umum tentang pendahuluan, agar mempermudah pembaca dan juga untuk menjawab pertanyaan apa saja yang ditulis dari penelitian ini, untuk apa dan mengapa tulisan ini dilakukan. Oleh karena itu, pada bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, penulis akan membahas landasan teori yang terdiri dari dua point pembahasan yaitu pembahasan pertama membahas politik Identitas, yang didalamnya berisi tiga pembahasan yaitu pengertian politik identitas, sejarah politik identitas dan antara politik identitas dan politik nilai. Pembahasan kedua mengenai metodologi tafsīr *al-Maqāṣidī*, yang didalam nya berisi dua pembahasan yaitu

²¹ Asyur, "Metod. Tafsir Maqasidi," 35.

pengertian tafsīr *al-Maqāṣidī*, sejarah tafsīr *al-Maqāṣidī*, langkah-langkah dan syarat-syarat metode tafsīr *Al-Maqāṣidī*, dan yang terakhir manfaat tafsīr *al-Maqāṣidī*.

Bab ketiga, penulis akan membahas mengenai biografi tokoh Sayyid Qutb, yang terdiri dari lima point pembahasan. Pembahasan pertama mengenai riwayat hidup Sayyid Qutb, pembahasan kedua pendidikan dan karir Sayyid Qutb, pembahasan ketiga karya-karya Sayyid Qutb, pembahasan keempat metode dan corak penafsiran Sayyid Qutb, pembahasan kelima yaitu tentang tafsīr Fī Zilāl Al-Qur'an, pembahasan keenam yaitu tentang politik Sayyid Qutb.

Bab keempat, penulis akan membahas mengenai penafsiraan Sayyid Qutb terhadap ayat-ayat al-Qur'an tentang politik identitas, pandangan al-Qur'an terhadap politik identitas yang didalamnya terdapat beberapa contoh diantaranya yaitu: politik identitas agama, politik identitas jenis kelamin, politik identitas etnis, suku, ras dan antar golongan, pembahasan selanjutnya mengenai prinsip-prinsip al-Qur'an tentang politik serta ayat-ayatnya. Dan pembahasan terakhir, yaitu analisis pandangan al-Qur'an terhadap politik identitas.

Bab kelima, adalah bagian dari penutup yang mencakup kesimpulan dari hasil penelitian dan saran saran serta daftar pustaka.